

## **KOLABORASI PERGURUAN TINGGI DAN PEMERINTAH DESA MELALUI PROGRAM KULIAH KERJA NYATA DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF**

**Tiara Primasari A Olii<sup>1</sup>, Muhammad Fahril Abd. Jalil L.<sup>2</sup>,  
Vania Dwi Maharani Husain<sup>3</sup>, Tiara Bukani<sup>4</sup>, Alexander H. Badjuka<sup>5</sup>**

**1 Prodi. Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo**  
[tiaraprimasari050@gmail.com](mailto:tiaraprimasari050@gmail.com)

**2 Prodi. Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo**  
[fahriljalil42@gmail.com](mailto:fahriljalil42@gmail.com)

**3 Prodi. Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo**  
[vaniahusain@gmail.com](mailto:vaniahusain@gmail.com)

**4 Prodi. Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo**  
[tiarabukani14@gmail.com](mailto:tiarabukani14@gmail.com)

**5 Prodi. Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo**  
[abadjuka@ung.ac.id](mailto:abadjuka@ung.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah desa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam mendukung perencanaan pembangunan partisipatif. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan program KKN Universitas Negeri Gorontalo di kawasan pesisir Teluk Tomini. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian bersumber dari data sekunder berupa laporan pelaksanaan KKN, dokumen perencanaan pembangunan desa, regulasi, artikel ilmiah, dan publikasi resmi pemerintah maupun perguruan tinggi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KKN memiliki kontribusi dalam mendukung perencanaan pembangunan partisipatif melalui kegiatan identifikasi masalah, pemetaan potensi desa, observasi sosial, dan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Program KKN juga memperlihatkan adanya pola collaborative governance antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa berbasis kebutuhan lokal. Selain meningkatkan partisipasi masyarakat, program KKN turut berkontribusi terhadap penguatan kapasitas aparatur desa melalui pendampingan administrasi, pengelolaan data desa, dan fasilitasi musyawarah pembangunan. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan waktu pelaksanaan, keberlanjutan program, dan belum optimalnya integrasi program KKN dengan dokumen perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa agar program KKN dapat mendukung pembangunan desa yang lebih partisipatif, responsif, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci: Kuliah Kerja Nyata (KKN), Collaborative Governance,  
Pemerintah Desa, Perguruan Tinggi, Perencanaan Pembangunan Desa**

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the collaboration between higher education institutions and village governments through the Community Service Program (Kuliah Kerja Nyata/KKN) in supporting participatory development planning. The research focuses on the implementation of the KKN program conducted by Universitas Negeri Gorontalo in the coastal area of Tomini Bay. The study employed a qualitative approach with a descriptive research design. The data were obtained from secondary sources, including KKN implementation reports, village development planning documents, regulations, scientific articles, and official publications from the government and universities. Data collection techniques were conducted through documentation studies and literature reviews, while data analysis used qualitative descriptive analysis through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the KKN program contributes to supporting participatory development planning through problem identification activities, village potential mapping, social observation, and community involvement in the implementation of development programs. The KKN program also demonstrates a collaborative governance pattern involving universities, village governments, and communities in supporting village development based on local needs. In addition to increasing community participation, the KKN program contributes to strengthening the capacity of village officials through administrative assistance, village data management, and facilitation of development deliberations. However, the implementation of the program still faces challenges, including limited implementation time, program sustainability, and the lack of optimal integration between KKN programs and village development planning documents. Therefore, strengthening the synergy between universities and village governments is necessary to ensure that the KKN program can support more participatory, responsive, and sustainable village development.*

**Keywords: Community Service Program (KKN), Collaborative Governance, Village Government, Higher Education, Village Development Planning**

**Submisi: 03-05-2026**  
**Diterima: 04-05-2026**  
**Dipublikasikan: 05-05-2026**

## PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Pendekatan ini bertujuan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam identifikasi masalah, penyusunan prioritas, hingga pelaksanaan program pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan local (Rietbergen-mccracken, 2014). Partisipasi masyarakat juga dipandang sebagai unsur penting dalam tata kelola pemerintahan daerah karena berhubungan dengan representasi kepentingan publik dan kualitas kebijakan pembangunan yang dihasilkan.

Penguatan pembangunan partisipatif di Indonesia memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk menyelenggarakan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma pembangunan desa dari pendekatan sentralistik menuju pendekatan yang lebih partisipatif. Akan tetapi, implementasi pembangunan partisipatif di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti dominasi pendekatan top-down, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan (Dewi, 2022). Penelitian Alkadafi et al., (2025) juga menunjukkan bahwa pembangunan desa di Indonesia masih dipengaruhi oleh praktik tata kelola yang tersentralisasi sehingga ruang partisipasi masyarakat dan fleksibilitas desa dalam menentukan prioritas pembangunan menjadi terbatas.

Berbagai penelitian menjelaskan bahwa pembangunan desa memerlukan pola tata kelola kolaboratif yang melibatkan banyak aktor pembangunan. Collaborative governance dipahami sebagai bentuk kerja sama antara pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam proses pengambilan keputusan publik melalui mekanisme partisipatif, konsensus, dan tanggung jawab bersama (Budi & Fauzela, 2025). Pendekatan kolaboratif dinilai relevan untuk pembangunan desa karena mampu mempertemukan sumber daya, pengetahuan, dan kepentingan berbagai pihak guna mendukung efektivitas pembangunan (Febrian, 2016). Selain itu, pembangunan desa membutuhkan keseimbangan antara pendekatan top-down dan bottom-up agar kebijakan pembangunan lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Perguruan tinggi merupakan salah satu aktor yang memiliki posisi penting dalam pembangunan daerah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki kontribusi terhadap pembangunan regional melalui pengembangan sumber daya manusia, inovasi, dan penguatan kapasitas sosial masyarakat (Rodionov et al., 2024; Sannikova et al., 2022). Perguruan tinggi juga dipandang mampu menjadi penghubung antara pengetahuan akademik dan kebutuhan masyarakat sehingga keterlibatan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah terus memperoleh perhatian dalam berbagai studi pembangunan regional (Marmolejo & Puukka, 2010; Sannikova et al., 2022).

Salah satu bentuk implementasi pengabdian perguruan tinggi kepada masyarakat adalah program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran mahasiswa, tetapi juga menjadi media interaksi antara perguruan

tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat. Melalui kegiatan identifikasi masalah, pemetaan potensi desa, penyusunan program, serta pemberdayaan masyarakat, KKN memiliki keterkaitan dengan proses perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa. Namun, penelitian mengenai KKN selama ini lebih banyak membahas aspek pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sosial, sedangkan kajian yang menempatkan KKN sebagai bagian dari collaborative governance dalam mendukung perencanaan pembangunan partisipatif masih relatif terbatas .

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah desa melalui program Kuliah Kerja Nyata dalam mendukung perencanaan pembangunan partisipatif. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan program KKN oleh Universitas Negeri Gorontalo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian perencanaan pembangunan partisipatif dan collaborative governance, sekaligus menjadi bahan masukan bagi penguatan sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dalam pembangunan daerah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah desa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam mendukung perencanaan pembangunan partisipatif. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan program KKN oleh Universitas Negeri Gorontalo.

Sumber data dalam penelitian berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui dokumen dan data publik yang tersedia, seperti laporan pelaksanaan KKN, dokumen perencanaan pembangunan desa, artikel ilmiah, regulasi terkait pembangunan desa, serta publikasi resmi pemerintah dan perguruan tinggi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada identifikasi bentuk kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa, keterlibatan masyarakat dalam program KKN, serta kontribusi program KKN terhadap proses perencanaan pembangunan partisipatif..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam proses identifikasi kebutuhan, penyusunan program, hingga pengambilan keputusan pembangunan. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat local (Rietbergen-mccracken, 2014).

*Collaborative governance* merupakan bentuk tata kelola yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah publik melalui proses partisipatif dan pengambilan keputusan bersama (Budi & Fauzela, 2025). Pendekatan ini dinilai relevan dalam pembangunan desa karena mampu

memperkuat koordinasi, partisipasi, dan efektivitas implementasi pembangunan (Alkadafi et al., 2025).

Perguruan tinggi memiliki kontribusi dalam pembangunan daerah melalui pengembangan sumber daya manusia, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat (Rodionov et al., 2024; Sannikova et al., 2022; Wei & Ma, 2025). Salah satu bentuk implementasi pengabdian masyarakat adalah program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa. Program ini dapat menjadi media kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan partisipatif.

### **Program KKN sebagai Bentuk Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Gorontalo di kawasan pesisir Teluk Tomini tidak hanya berorientasi pada pengabdian masyarakat, tetapi juga diarahkan pada penguatan pembangunan desa berbasis kolaborasi. Program KKN dilaksanakan melalui kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir, pengelolaan lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya keterlibatan berbagai aktor pembangunan dalam pelaksanaan program desa.

Temuan ini memperlihatkan bahwa program KKN telah berkembang menjadi media kolaboratif dalam mendukung pembangunan desa. Keterlibatan pemerintah desa dalam penyusunan dan pelaksanaan program menunjukkan adanya proses koordinasi dan pembagian peran antara perguruan tinggi dan pemerintah lokal. Dukungan pemerintah desa terhadap pelaksanaan KKN juga memperlihatkan bahwa program yang dijalankan tidak sepenuhnya bersifat akademik, tetapi memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan agenda pembangunan desa.

Hasil tersebut sejalan dengan konsep collaborative governance yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah publik melalui kerja sama dan pengambilan keputusan bersama (Budi & Fauzela, 2025). Collaborative governance memandang pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara sektoral oleh pemerintah saja, tetapi memerlukan sinergi antarlembaga dan partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaan KKN di kawasan pesisir Teluk Tomini, perguruan tinggi berperan sebagai fasilitator pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan pemerintah desa berfungsi sebagai aktor lokal yang memahami kebutuhan pembangunan desa.

Temuan penelitian ini juga mendukung penelitian Alkadafi et al., (2025) yang menjelaskan bahwa pembangunan desa membutuhkan pendekatan hybrid dan collaborative governance untuk mengurangi dominasi pendekatan top-down dalam pembangunan desa. Program KKN yang dilaksanakan UNG menunjukkan adanya kombinasi pendekatan akademik, partisipatif, dan kebutuhan lokal dalam proses pembangunan desa pesisir. Selain itu, penelitian Febrian (2016) menegaskan bahwa collaborative governance mampu memperkuat pembangunan kawasan perdesaan melalui integrasi sumber daya dan kolaborasi antaraktor pembangunan.

Perspektif perencanaan pembangunan partisipatif, pelaksanaan KKN di kawasan pesisir Teluk Tomini menunjukkan adanya upaya melibatkan masyarakat dalam identifikasi masalah dan pelaksanaan program pembangunan desa. Mahasiswa tidak hanya menjalankan program kerja yang bersifat formal, tetapi juga melakukan observasi sosial dan penyesuaian program berdasarkan kondisi masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan bottom-up dalam pelaksanaan program pembangunan masyarakat desa. Temuan tersebut relevan dengan pandangan Rietbergen-mccracken (2014) yang menyebutkan bahwa pembangunan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses penentuan kebutuhan dan prioritas pembangunan.

### **Kontribusi Program KKN terhadap Perencanaan Pembangunan Partisipatif**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KKN Universitas Negeri Gorontalo di kawasan pesisir Teluk Tomini memiliki kontribusi terhadap proses perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa. Melalui kegiatan observasi lapangan, identifikasi masalah sosial, pemetaan potensi wilayah, dan interaksi langsung dengan masyarakat, mahasiswa KKN memperoleh berbagai informasi mengenai kebutuhan dan permasalahan pembangunan desa. Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program kerja selama pelaksanaan KKN.

Pelaksanaan program KKN juga memperlihatkan adanya keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa, seperti pengelolaan lingkungan pesisir, edukasi kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa program KKN tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan akademik mahasiswa, tetapi juga menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Temuan ini menunjukkan bahwa program KKN memiliki keterkaitan dengan pendekatan participatory development planning yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan. Pendekatan partisipatif menekankan bahwa pembangunan akan lebih efektif apabila masyarakat dilibatkan dalam proses identifikasi kebutuhan dan penyusunan prioritas pembangunan (Rietbergen-mccracken, 2014).

Pelaksanaan kegiatan KKN di kawasan pesisir Teluk Tomini, mahasiswa berperan sebagai fasilitator yang membantu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan program pembangunan yang dilaksanakan di desa. Oleh karena itu, melalui kegiatan tersebut perlunya suatu keberlanjutan dari keberadaan KKN yang lakukan pihak kampus melalui Mahasiswa. Sehingga, mampu memberikan Kontribusi yang sangat positif bagi masyarakat sekitar.

Hasil penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Muluk et al., (2020) yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang representatif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Program KKN memberikan ruang interaksi antara masyarakat, pemerintah desa, dan perguruan tinggi sehingga proses pembangunan tidak hanya didasarkan pada kebijakan administratif pemerintah desa, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat secara langsung.

Pelaksanaan KKN di kawasan pesisir Teluk Tomini memperlihatkan adanya pendekatan bottom-up dalam pembangunan desa. Program kerja yang dijalankan

mahasiswa cenderung menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, terutama pada isu pengelolaan lingkungan pesisir, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pendidikan masyarakat desa. Temuan tersebut mendukung penelitian Dewi (2022) yang menjelaskan bahwa pembangunan desa memerlukan keseimbangan antara pendekatan top-down dan bottom-up agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berjalan lebih optimal.

Sudut pandang administrasi publik, bahwa keterlibatan perguruan tinggi melalui program KKN dapat dipandang sebagai bentuk penguatan kapasitas pembangunan lokal. Perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam transfer pengetahuan akademik, tetapi juga membantu pemerintah desa dalam memahami persoalan pembangunan masyarakat secara lebih partisipatif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa program KKN memiliki potensi sebagai media pendukung perencanaan pembangunan desa berbasis kolaborasi dan partisipasi masyarakat.

### **Tantangan Kolaborasi dalam Pelaksanaan Program KKN**

Meskipun program KKN Universitas Negeri Gorontalo di kawasan pesisir Teluk Tomini menunjukkan kontribusi terhadap pembangunan partisipatif desa, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu pelaksanaan KKN yang relatif singkat sehingga beberapa program belum dapat berjalan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih bersifat sementara dan bergantung pada periode pelaksanaan KKN.

Sinkronisasi antara program KKN dan dokumen perencanaan pembangunan desa juga belum sepenuhnya optimal. Program kerja mahasiswa umumnya disusun berdasarkan hasil observasi lapangan dan kebutuhan masyarakat, namun dalam beberapa kondisi belum seluruhnya terintegrasi dengan prioritas pembangunan desa yang tercantum dalam dokumen RPJMDes maupun hasil Musrenbang desa. Situasi ini menunjukkan bahwa koordinasi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa masih memerlukan penguatan, terutama dalam proses perencanaan program yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Tantangan lain berkaitan dengan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa dalam mempertahankan keberlanjutan program setelah KKN selesai dilaksanakan. Beberapa program pemberdayaan masyarakat memerlukan pendampingan jangka panjang agar dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap pembangunan desa. Keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan desa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberlanjutan program pembangunan berbasis masyarakat.

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian Alkadafi et al., (2025) yang menjelaskan bahwa pembangunan desa di Indonesia masih menghadapi persoalan koordinasi, keterbatasan partisipasi, dan dominasi pendekatan administratif dalam implementasi kebijakan pembangunan desa. Penelitian tersebut menekankan bahwa collaborative governance memerlukan dukungan kelembagaan, koordinasi lintas aktor, dan komitmen bersama agar kolaborasi pembangunan dapat berjalan efektif.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pandangan Budi & Fauzela (2025) yang menyebutkan bahwa keberhasilan collaborative governance di tingkat desa dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, proses konsensus, dan keberlanjutan

tindak lanjut program pembangunan. Dalam pelaksanaan KKN di kawasan pesisir Teluk Tomini, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat telah menunjukkan adanya pola kolaboratif, namun aspek keberlanjutan program dan integrasi dengan kebijakan pembangunan desa masih memerlukan penguatan.

Perspektif perencanaan pembangunan partisipatif, tantangan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak cukup hanya melalui pelibatan dalam pelaksanaan program, tetapi juga membutuhkan integrasi dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, hingga evaluasi pembangunan desa. Oleh karena itu, program KKN perlu diarahkan tidak hanya sebagai kegiatan pengabdian masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan sistem perencanaan pembangunan desa berbasis kolaborasi dan partisipasi masyarakat.

Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk implementasi tridarma perguruan tinggi yang memiliki kontribusi strategis terhadap penguatan pembangunan desa. Dalam konteks Program Studi Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo, pelaksanaan KKN tidak hanya menjadi media pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penguatan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam proses pembangunan desa memberikan ruang sinergi antara kapasitas akademik perguruan tinggi dengan pengalaman empiris masyarakat desa dalam mengidentifikasi berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi.

Pelaksanaan KKN oleh mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo menunjukkan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa mampu menciptakan hubungan kerja yang saling mendukung dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif. Pemerintah desa sebagai aktor utama pembangunan lokal memiliki kewenangan dalam menyusun rencana pembangunan desa melalui dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya kapasitas administrasi pemerintahan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan desa. Kehadiran mahasiswa KKN menjadi faktor pendukung yang membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas proses perencanaan tersebut.

Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik memiliki kompetensi akademik yang relevan dengan tata kelola pemerintahan, administrasi publik, pelayanan publik, kebijakan publik, serta perencanaan pembangunan. Kompetensi ini menjadi modal penting dalam membantu pemerintah desa melakukan pemetaan masalah, pengumpulan data sosial, penyusunan dokumen administrasi, hingga fasilitasi musyawarah desa. Dalam proses KKN, mahasiswa tidak hanya bertindak sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai fasilitator sosial yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kolaborasi yang terbangun tidak bersifat formalitas, melainkan menciptakan proses interaksi yang partisipatif antara pemerintah desa, masyarakat, dan perguruan tinggi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa program KKN mampu meningkatkan kesadaran masyarakat desa terhadap pentingnya partisipasi dalam pembangunan. Sebelum

adanya pendampingan mahasiswa, sebagian masyarakat cenderung menganggap bahwa pembangunan desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Akan tetapi, melalui kegiatan sosialisasi, diskusi kelompok, dan musyawarah partisipatif yang difasilitasi mahasiswa, masyarakat mulai memahami bahwa pembangunan desa membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat agar program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal. Partisipasi masyarakat menjadi lebih aktif, terutama dalam penyampaian aspirasi terkait pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelayanan administrasi desa, serta pengembangan potensi desa.

Meningkatnya partisipasi masyarakat, kolaborasi antara Program Studi Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo dan pemerintah desa juga memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa. Mahasiswa KKN membantu aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, penyusunan data desa, digitalisasi pelayanan, serta penguatan tata kelola dokumen pembangunan. Dalam beberapa kasus, pemerintah desa mengalami keterbatasan dalam penyusunan laporan administrasi dan pengelolaan data pembangunan karena rendahnya kemampuan teknis aparatur. Kehadiran mahasiswa menjadi bentuk transfer pengetahuan yang membantu aparatur desa memahami mekanisme administrasi publik yang lebih efektif dan akuntabel. Dengan demikian, program KKN tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan.

Perspektif pembangunan partisipatif, kolaborasi ini mencerminkan adanya pendekatan *bottom-up* dalam proses perencanaan pembangunan desa. Mahasiswa KKN berperan dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa sehingga aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pendekatan ini penting karena pembangunan yang dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat cenderung lebih efektif, tepat sasaran, dan memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi. Melalui forum musyawarah desa yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan kelompok tani, proses pengambilan keputusan menjadi lebih demokratis dan inklusif.

Hasil analisis juga menunjukkan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu pelaksanaan KKN yang relatif singkat sehingga tidak seluruh program dapat berjalan secara optimal. Proses pemberdayaan masyarakat membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan, sementara mahasiswa hanya berada di lokasi KKN dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan musyawarah desa karena faktor pendidikan, budaya, dan rendahnya pemahaman mengenai pentingnya partisipasi publik. Hambatan lainnya adalah perbedaan pola pikir antara mahasiswa dan masyarakat desa yang terkadang mempengaruhi proses komunikasi dan implementasi program kerja.

Kolaborasi antara Program Studi Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo dan pemerintah desa melalui program KKN tetap memberikan kontribusi positif terhadap penguatan pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat. Program ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran praktis bagi mahasiswa, tetapi juga menjadi media penguatan kapasitas pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mahasiswa memperoleh pengalaman

empiris mengenai dinamika administrasi publik di tingkat lokal, sementara pemerintah desa mendapatkan dukungan akademik dan teknis dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah desa melalui program KKN memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan partisipatif. Sinergi antara kompetensi akademik mahasiswa dan kebutuhan pembangunan desa mampu menciptakan proses pembangunan yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis aspirasi masyarakat. Keberhasilan kolaborasi ini sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah desa, partisipasi masyarakat, serta kesiapan perguruan tinggi dalam melakukan pendampingan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama antara perguruan tinggi dan pemerintah desa agar program KKN tidak hanya bersifat kegiatan rutin akademik, tetapi benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan penguatan tata kelola pembangunan desa secara berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Gorontalo di kawasan pesisir Teluk Tomini memiliki keterkaitan dengan proses perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa. Melalui kegiatan identifikasi masalah, pemetaan potensi wilayah, observasi sosial, dan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program, KKN berkontribusi dalam mendukung pendekatan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat lokal.

Pelaksanaan program KKN juga memperlihatkan adanya pola kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mendukung proses pembangunan desa. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada pendekatan administratif pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi masyarakat dan dukungan kelembagaan dari perguruan tinggi sebagai mitra pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KKN dapat menjadi media pendukung perencanaan pembangunan partisipatif melalui pendekatan bottom-up yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan desa. Namun demikian, efektivitas kontribusi KKN terhadap perencanaan pembangunan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan waktu pelaksanaan program, keberlanjutan kegiatan, dan belum optimalnya integrasi program KKN dengan dokumen perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa diperlukan agar program KKN dapat lebih terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan desa secara berkelanjutan. Dengan demikian, KKN tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan akademik dan pengabdian masyarakat, tetapi juga dapat mendukung proses perencanaan pembangunan desa yang lebih partisipatif, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkadafi, M., Wasistiono, S., & Broto, M. F. (2025). Hybrid and Collaborative Governance Model for Village Development in Indonesia. 15(2), 209–228. <https://doi.org/10.31289/jap.v15i2.14443>
- Budi, A. A., & Fauzela, D. S. (2025). Collaborative Village Governance: Understanding and Building Models. *Proceeding of The International Conference on Multidisciplinary Studies (ICOMSI)*, 2(1), 68–81.
- Dewi, M. S. (2022). Implementasi Pendekatan Participatory Development Planning oleh Pemerintah Desa Setelah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(8), 663–675. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i8.292>
- Febrian, R. A. (2016). COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS (Review of the Draft and Regulation). *Jurnal Kajian Pemerintah II* (2016): 200–208. <http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824> diakses pada tanggal 5 April 2019 pukul 02:55 WIB
- Marmolejo, F., & Puukka, J. (2010). Supporting the contribution of higher education to regional development: lessons from an OECD review of 14 regions throughout 12 countries. *Revista de Economia*, 35(3). <https://doi.org/10.5380/re.v35i3.16708>
- Muluk, M. R. K., Danar, O. R., & Rahmawati, L. (2020). Community Participation and Development Planning in Local Government Level: A Study on the Formulation of Batu City Medium-Term Development Plan. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 26(3). <https://doi.org/10.20476/jbb.v26i3.11145>
- Rietbergen-mccracken, J. (2014). PGX\_F\_Participatory Development Planning. *Pg Exchange*, 1–16.
- Rodionov, D., Rudskaia, I., Krasnova, D., & Zhogova, E. (2024). The Role of Higher Education in Regional Development. *International Journal of Technology*, 15(5), 1573–1581. <https://doi.org/10.14716/ijtech.v15i5.6211>
- Sannikova, I. N., Bulatova, G. A., & Kuzina, E. V. (2022). Assessing the Contribution of Higher Education to Regional Development. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 22(1), 83–91. <https://doi.org/10.33423/jhetp.v22i1.4965>
- Wei, C., & Ma, Y. (2025). The Effects of Higher Education on Regional Economic Development and the Mediating Role of Regional Innovative Capabilities: Evidence From China (Issue Icssed). *Atlantis Press International BV*. [https://doi.org/10.2991/978-94-6463-734-2\\_33](https://doi.org/10.2991/978-94-6463-734-2_33)

## **TENTANG PENULIS**